

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Faisal, Moch. Salam, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Bandung, Pustaka, 2005.
- Faizal, Henry Noor, *Ekonomi Publik Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat* Padang Akademia Permata, 2013.
- Farida, Maria Indarti, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta. 2010. hlm. 16.
- Hanityo, Ronny Sumtro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Husni, H. Thamrin. *Hukum Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.
- Ibrahim, *BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- Kartika, Elsi Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, PT Grasindo, 2005.
- Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2010
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munir, Fuady, *Hukum Anti Monopoli*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003.
- Nugroho, Riant dan Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta. Hlm. 286
- Poltak, Lijan Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013.
- Purwosusilo, H, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia, Jakarta, 2014.
- Ryaas , M. Rasjid, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dala Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka, 1998.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Pemeriksa Keuangan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 12 C/LHP/XVIII.YOG/06/2009 Tanggal 10 Juni 2009.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Atas Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi DIY Dengan PT Jogja Tugu Trans Dan Relasi APBD Terkait Dengan Pelaksanaan Perjanjian Nomor: 34/LHP/XVIII.YOG/12/2011 Tanggal 15 Desember 2011.

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT Jogja Tugu Trans Nomor: 17/KES.BER/GUB/2007 Tetang Kerja sama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah perkotaan.

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT Jogja Tugu Trans Nomor: 4/PERJ/GUB/II/2008 Tetang Kerja sama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah perkotaan.

Keputusan Gubernur DIY Nomor 384/KEP/2016 Tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindiya Mitra Internasional Sebagai Penyelenggara Sistem Angkuta Umum Perkotaan Bersubsidi.

Keputusan Gubernur DIY Nomor 403/KEP/2016 Tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindiya Mitra Internasional Sebagai Penyelenggara Sistem Angkuta Umum Perkotaan Bersubsidi.